

WHY MICRO BUSINESS HAS NOT READY TO IMPLEMENT ACCOUNTING STANDARDS YET?

Rafi Fahmi Sandy¹, Pepie Diptyana², Erida Herlina³

^{1,2,3} Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, Indonesia

rafikaze1@gmail.com¹, pepie@perbanas.ac.id², erida@perbanas.ac.id³

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Histori Artikel :

Tgl. Masuk: 14-02-2023

Tgl. Diterima : 30-03-2023

Tersedia Online : 30-03-2023

Keywords:

accrual basis, entity concept, MSMEs accounting standards, skeptical, pragmatism

This study aims to describe the reasons of why micro businesses have not implemented accounting standards. We employ non-mainstream method with an interpretive paradigm. Data was collected by in-depth interviews and observations. Main informants of this study are leather craft entrepreneurs in Tanggulangin, Sidoarjo. Due to data validation, triangulation was carried out through interview with owner, three employees and one expert resource person, an active director of a venture capital company, and we also conduct document review. We found that entrepreneur has intention to implement record-keeping procedures, but have not been able yet to apply EMKM accounting standards due to: (1) limited knowledge about the importance of accrual-based accounting and company performance measurement; (2) skeptical attitude towards accounting and pragmatism in financial management; (3) limited human resources.

PENDAHULUAN

Penerbitan SAK EMKM (Entitas Mikro, Kecil dan Menengah) dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan pelaporan keuangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) khususnya bagi UMKM yang belum atau tidak mampu menerapkan SAK ETAP. SAK EMKM telah disahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sejak tahun 2016, dan berlaku efektif per 1 Januari 2018. SAK EMKM diharapkan dapat membantu UMKM untuk menyajikan laporan keuangan yang serta memudahkan akses pendanaan UMKM dari berbagai lembaga keuangan. SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang sederhana, yaitu dasar pengukurannya yang menggunakan *historical cost*, bukan *fair*

value. Aset dan liabilitas juga cukup dicatat sebesar biaya perolehannya. Menurut SAK EMKM, laporan keuangan minimum yang disajikan ada 3, yaitu Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode, Laporan Laba Rugi selama periode, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. SAK EMKM juga mensyaratkan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, bahwa EMKM harus memenuhi asumsi konsep entitas, kelangsungan hidup dan basis akrual.

Keberadaan SAK EMKM yang lebih sederhana dibandingkan SAK lainnya ini seharusnya mampu mendorong pelaku UMKM untuk mengimplementasikan akuntansi. Praktik akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAK akan bermanfaat bagi UMKM untuk

mengukur kinerja usaha lebih akurat. Keakuratan data akuntansi dapat membantu pelaku UMKM menentukan alokasi sumber daya dengan lebih baik, serta memperluas kesempatan untuk memperoleh modal. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang belum menerapkan SAK EMKM. Hasil survey (Dewi & Sari, 2019) menyimpulkan bahwa 87% dari 77 sampel responden UMKM di Kabupaten Buleleng mengetahui tentang dasar akuntansi, walaupun ternyata belum menerapkan SAK UMKM. Hasil penelitian lain juga menyimpulkan bahwa UMKM tidak siap menerapkan SAK karena tidak mengetahui adanya SAK EMKM (Parwati & Putra, 2022; Rejeki, 2020). Anisah & Pujiati (2018) Sholikin & Setiawan (2018), dan Zulfikar et al., (2022). Penelitian-penelitian tersebut belum menjelaskan secara mendalam alasan utama mengapa UMKM tidak menerapkan SAK EMKM.

Beberapa peneliti mengungkapkan faktor yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM, seperti : pemahaman akuntansi pelaku UMKM, pengetahuan pelaku UMKM tentang SAK, dan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM). Survey terhadap 100 pelaku UMKM di Pasar Musi, Kota Depok, mengungkapkan bahwa pemahaman akuntansi oleh pelaku UMKM dan kesiapan UMKM dapat menentukan diterapkan atau tidaknya SAK EMKM (Fiani & Opti, 2022). Demikian juga survey pada 60 pelaku UMKM di Kabupaten Wonosobo, (Auliah, 2019) membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan keuangan UMKM. Pelaku UMKM dengan pemahaman akuntansi yang tinggi cenderung mampu menerapkan SAK EMKM, karena mereka mampu menyiapkan dokumentasi yang memadai untuk penyusunan laporan keuangan. Selain pemahaman akuntansi, pengetahuan tentang standar juga mempengaruhi penerapan SAK EMKM. Dari 50 responden UMKM di Gianyar, (Parwati & Putra, 2022) menyimpulkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui adanya SAK untuk UMKM. Ketidaktahuan tentang SAK

EMKM menyebabkan para pelaku UMKM tidak memiliki acuan dasar penyusunan laporan keuangan. Implementasi SAK EMKM membutuhkan dokumentasi yang memadai, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang mendukung kegiatan pencatatan keuangan (Anisah & Pujiati, 2018; Luchindawati et al., 2021; Parwati & Putra, 2022).

Teori yang mendasari pelaporan keuangan adalah teori entitas (Clark, 1993). Pelaporan keuangan ini digunakan untuk menunjukkan kinerja atau nilai suatu perusahaan. Teori entitas dikembangkan oleh Paton (1922) serta Modigliani & Miller, (1958) menyatakan bahwa aset perusahaan adalah milik perusahaan, bukan milik pemberi modal atau pemegang saham. Laba perusahaan (*corporate income*) adalah milik perusahaan. Distribusi laba perusahaan kepada para pemberi modal dialokasikan secara terpisah. Oleh karena itu berdasarkan teori ini, perusahaan perlu membuat laporan berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas.

Menyusun laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM merupakan keputusan pelaku UMKM. Teori perilaku perencanaan (*theory of planned behavior*) yang dikembangkan oleh Ajzen di tahun 1988 menjelaskan bahwa niat (dan perilaku) ditentukan oleh tiga determinan, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian (Ajzen, 2005). Dalam konteks implementasi SAK EMKM, sikap bisa berupa perasaan positif atau negatif tentang penerapan SAK EMKM. Norma subjektif merupakan pandangan pelaku UMKM terhadap kepercayaan orang lain tentang implementasi SAK EMKM. Norma subjektif ini sebagai faktor “tekanan sosial” bagi pelaku UMKM, yang bisa mendorong atau menghambat niat dan perilaku mengimplementasikan SAK EMKM. Sementara itu, faktor kontrol perilaku persepsian mencakup pengetahuan tentang SAK EMKM, biaya, waktu, keyakinan atas kemampuan diri, kemampuan untuk mengakses pengetahuan atau sumber data, kemudahan untuk melakukan perilaku tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengapa pelaku UMKM tidak siap mengimplementasikan SAK EMKM. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mencari faktor pengaruh dengan metode survey dan membatasi amatan pada faktor-faktor yang telah ditentukan, maka penelitian ini lebih membuka kesempatan pelaku UMKM untuk bercerita alasan sebenarnya mengapa SAK EMKM belum diimplementasikan. Wawancara yang mendalam memungkinkan responden untuk membuka sikap, niat dan persepsinya tentang kesiapannya untuk mengimplementasikan SAK EMKM. Pertanyaan kunci dan fokus penulisan penelitian adalah bagaimana kesiapan UMKM untuk menerapkan SAK EMKM. Kesiapan UMKM ini mencakup pengetahuan pelaku usaha tentang SAK EMKM, penerapan asumsi dasar akuntansi, serta sejauh mana prosedur pencatatan yang ada di UMKM dapat mendukung penyusunan keuangan berbasis SAK EMKM untuk menggali potensi penyajian laporan keuangan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Paradigma interpretif merupakan metode yang tepat digunakan untuk menjelaskan praktik akuntansi yang berkaitan dengan manusia, budaya dan agama (Darmayasa & Aneswari, 2015). Hasil wawancara dan observasi mendalam digunakan sebagai bahan kajian untuk menjelaskan mengapa usaha mikro belum siap menerapkan SAK EMKM. Hasil penelitian ini bermanfaat dasar pertimbangan praktik akuntansi UMKM, khususnya di usaha mikro, serta memperkaya literatur bidang akuntansi UMKM.

TINJAUAN LITERATUR

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

SAK EMKM digunakan oleh entitas mikro, kecil dan menengah. Pada Bab 1 tentang Ruang Lingkup SAK EMKM, disebutkan bahwa EMKM adalah entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yang signifikan, yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Tabel 1. Klasifikasi UMKM

No	Indikator	UU 20/2008	No.	PP No. 7/2021
1	Kriteria pembeda per kategori	1. Kekayaan Bersih (Total Aset dikurangi Total Kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan) 2. Hasil Penjualan Tahunan. (hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku)	1.	Modal Usaha untuk Pendirian atau Pendaftaran Usaha (Modal Sendiri dan Modal Pinjaman. Pelaku usaha yang melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha, terdiri dari: (a) badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; (b) perorangan
2	Kekayaan Bersih, atau Modal Usaha; tidak termasuk tanah dan bangunan	1. Mikro : Kekayaan Bersih <Rp 50juta 2. Kecil : Kekayaan Bersih lebih besar daripada Rp 50juta hingga paling banyak Rp500 juta 3. Menengah : Kekayaan Bersih lebih besar dari Rp 500 juta, sampai dengan terbesar Rp 10milyar	1. 2. 3.	Mikro : Modal Usaha < Rp 1 Miliar Kecil : Modal Usaha lebih dari Rp 1 Miliar sampai dengan paling banyak Rp 5 Miliar Menengah : Modal Usaha > Rp 5 miliar

3	Hasil Penjualan Tahunan	1. Mikro : Hasil Penjualan Tahunan < Rp 300juta	1. Mikro : Hasil Penjualan Tahunan < Rp 2 milyar
		2. Kecil : Hasil Penjualan Tahunan lebih besar dari Rp 300juta, hingga Rp 2,5 miliar	2. Kecil : Hasil Penjualan Tahunan lebih besar dari Rp 2 milyar, hingga paling banyak Rp 15 miliar
		3. Menengah : Hasil Penjualan Tahunan lebih besar dari RP 2,5 miliar sampai dengan Rp 50milyar	3. Menengah : Hasil Penjualan Tahunan lebih besar dari Rp 15 miliar sampai dengan Rp 50 milyar

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2021; Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, 2008

Asumsi Dasar di SAK EMKM

SAK EMKM memuat tiga asumsi dasar, yaitu: Dasar Akrua, Kelangsungan Usaha, dan Konsep Entitas (IAI, 2016). *Asumsi yang pertama*, adalah Dasar Akrua. SAK EMKM menghendaki penyusunan laporan keuangan berbasis akrua. Pos-pos di aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban, diakui ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan secara akrua. Aset diakui ketika manfaat ekonomiknya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas, dan nilai biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal. Liabilitas diakui sebagai pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik dipastikan akan dilakukan untuk

menyelesaikan kewajiban entitas, dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Penghasilan, diakui di laporan laba rugi, ketika ada kenaikan manfaat ekonomik di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset, atau penurunan liabilitas telah terjadi, dan juga dapat diukur dengan andal. Beban, diakui di laporan laba rugi, sebagai terjadinya penurunan manfaat ekonomik di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset, atau kenaikan liabilitas telah terjadi, dan dapat diukur dengan andal. *Asumsi Kedua* ialah Kelangsungan Usaha, bahwa entitas tidak dimaksudkan untuk dilikuidasi atau dihentikan operasinya. Jika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas tersebut harus mengungkapkan fakta alasannya. Purba (2009) menyebutkan bahwa asumsi kelangsungan usaha ini berkaitan erat dengan teori entitas yang dicetuskan oleh Paton. Kelangsungan hidup entitas terpisah dari kelangsungan hidup pemiliknya, dan asumsi ini hanya berlaku pada organisasi bermotif laba. *Asumsi ketiga* adalah Konsep Entitas. Konsep ini menghendaki bahwa perusahaan dan pemilik perusahaan adalah pihak yang berbeda (Purba, 2009). Suatu entitas bisnis, apapun bentuknya, baik usaha perorangan, berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, harus terpisah jelas dengan pemilik bisnisnya. Transaksi bisnis entitas harus dipisahkan dari transaksi pemilik bisnis. Aktiva adalah milik perusahaan, kewajiban dan ekuitas adalah klaim atas aktiva. Laba perusahaan bukanlah hak pemilik perusahaan, sebelum laba itu dibagikan ke pemilik dalam bentuk dividen.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Romney & Steinbart, (2018) mendefinisikan SIA sebagai suatu set atau kumpulan komponen yang bekerjasama dalam mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Komponen SIA terdiri dari orang-orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi,

pengendalian internal serta langkah-langkah keamanan untuk melindungi data SIA. SIA dapat diimplementasikan dengan *paper-based* (manual), kombinasi antara kertas dan teknologi informasi, atau dapat juga *totally paperless* (Mulyadi, 2016; Romney & Steinbart, 2018). Pada umumnya, implementasi SIA terbagi menjadi lima sub-set siklus, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus sumber daya manusia dan siklus pelaporan keuangan dan pelaporan manajemen. Kelima sub-set siklus tersebut saling berhubungan. Pengumpulan data saldo-saldo akun yang akan disajikan di laporan keuangan, terjadi pada setiap sub-set siklus tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan paradigma interpretif dengan metode interaksi simbolik. Paradigma interpretif dapat membantu peneliti untuk dapat melihat lebih dalam suatu realitas sosial, kemudian peneliti menentukan apakah realitas itu merupakan simbol dan ide tentang masalah yang diteliti (*Shonhadji, 2021*). Pengungkapan proses interaksi yang diharapkan adalah yang natural, bukan interaksi dari situasi buatan. Dengan metode interaksi simbolik, peneliti memaknai simbol yang muncul dalam interaksi. Oleh karena itu, metode ini dapat menggambarkan kenyataan tentang bidang ilmu yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, interaksi yang diamati adalah pemilik dengan manajer dan pegawai dalam kegiatan akuntansi. Data dikumpulkan dengan wawancara dan observasi. Pada analisis penelitian kualitatif, peneliti melakukan kategorisasi, rasionalisasi relasi, dan merangkai cerita (Soeherman, 2019). Data dikelompokkan sesuai kategori yang dianalisis, yaitu pengetahuan SAK EMKM, implementasi asumsi dasar pelaporan keuangan, dan prosedur pencatatan. Selanjutnya, tahap rasionalisasi relasi dilakukan untuk mencari keterkaitan antar-data, sebab-akibat, kondisi-interaksi, strategi dan teknis, dan hubungan rasional lain untuk memastikan kelengkapan dan relevansi data. Tahap terakhir analisis data

dilakukan dengan merangkai narasi, hasilnya berupa paparan deskriptif realitas sosial yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan utama pada penelitian ini ialah pelaku usaha mikro kerajinan kulit Prasetyo Utomo Collection di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Usaha ini didirikan tahun 2009 dengan modal awal Rp 2.000.000,- oleh Bapak HPU (39 tahun) dan tiga orang rekannya: Bapak MFM (38 tahun), Bapak RR (38 tahun), dan Bapak NS (37 tahun). Mereka berempat bersahabat sejak Sekolah Dasar hingga lulus Sekolah Menengah Atas. Tenaga kerja pengrajin berjumlah 30 orang yang terdiri dari pengrajin tetap delapan orang dan sisanya tidak tetap, satu orang manajer produksi. Sejak usaha ini didirikan, aktivitas kantor dan produksi dilakukan di rumah Bapak HPU di Desa Ketapang, Jalan Singosari, Tanggulangin. Untuk produk tertentu, pengrajin lepas dapat mengerjakan tugasnya di rumah masing-masing. Sekitar tahun 2012, Bapak HPU membeli gudang untuk barang jadi di Ruko Pasar Wisata B1-19, Tanggulangin. Usaha ini memiliki satu gerai di Tanggulangin, dan juga menjadi pemasok beberapa gerai di Pasar Wisata Tanggulangin, serta gerai-gerai di *mall* kelas menengah di Surabaya.

Wawancara dan pengamatan dilakukan di lokasi produksi dengan durasi rata-rata 2 jam setiap pertemuan. Di setiap pertemuan, peneliti selalu bertemu dengan pemilik (Bapak HPU) dan didampingi dua atau tiga orang rekan kerja utamanya. Wawancara dilakukan santai, pada saat jam kerja untuk pengamatan produksi, atau setelah jam kerja produksi.

Pada awal pertemuan, peneliti dan informan membahas tentang sejarah usaha, terkait dengan modal awal, siapa saja yang terlibat pada pendirian usaha, dan proses bisnis. Pada proses produksi, Pak HPU mempekerjakan dua orang kepala bagian. Pak Mesran sebagai kepala bagian produksi kerajinan dompet, dan Pak Choirul sebagai kepala bagian produksi kerajinan tas. Kepala produksi

bertanggungjawab atas pemenuhan volume produksi dan mengontrol kualitas. Sementara itu, Pak HPU dan rekannya mengawasi secara langsung semua pekerjaan. Tanggungjawab penjualan, distribusi produk dan arus kas ada di tangan empat sekawan: pak HPU, MFM, RR dan NS.

Pengetahuan tentang Akuntansi dan SAK EMKM

Keputusan ekonomi akan lebih baik apabila dibuat berdasarkan data. Akuntansi berperan penting pada penyajian data dan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Lembaga penyedia dana pinjaman mensyaratkan adanya laporan keuangan memenuhi standar akuntansi, agar dapat mengevaluasi risiko dan kelayakan perusahaan calon debiturnya. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki laporan keuangan akan mendapat kesempatan akses pendanaan lebih luas. Pertanyaannya adalah: apakah pelaku usaha mikro sudah memiliki pengetahuan tentang akuntansi dan SAK EMKM?

Pak HPU dan Pak MFM menyatakan bahwa sejak merintis usaha, mereka tidak paham akuntansi. Sejalan dengan hasil penelitian (Salmiah et al., 2018), Pak HPU mengetahui laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi dan neraca, mampu menyebutkan sebagian besar nama-nama akun utama dan klasifikasinya dalam laporan keuangan. Namun, belum memahami manfaat, metode pengakuan dan pengukurannya, seperti yang disajikan pada kutipan hasil wawancara:

1. “aku gak ngerti akuntansi, istilah-istilaha njelimet, laporan keuangan yo pokoke ngertine uang masuk dan uang keluar, iso mlaku, iso tuku bahan” – pak NS

[terj. Ind.: saya tidak mengerti akuntansi, istilahnya rumit, pemahaman saya tentang laporan keuangan adalah uang masuk dan uang keluar, operasional perusahaan dapat berjalan, membeli bahan];

2. “ngene wae utang yo Alhamdulillah iso lunas” – Pak HPU

[terj. Ind.: dengan begini saja Alhamdulillah bisa melunasi utang].

3. “lek dari awal emang saya ndak paham tentang laporan, tapi lek misal pendapatan (perusahaan) saya tahu, nah lek beban keuangan iki koyok lek misal aku gaji, terus tuku bensin ngunu a? Lek pajak saya udah ada NPWP.” – Pak HPU

[terj. Ind.: sejak awal (berdirinya usaha) saya tidak paham laporan, tapi jika pendapatan saya tahu, nah jika beban keuangan itu misalnya gaji, dan membeli bensin, begitu saya tahu. Kalau pajak, saya sudah punya NPWP]. – Kemudian, Pak HPU menunjukkan Kartu NPWP Pribadi, bukan Badan.

Namun, ada pernyataan Pak RR sebagai berikut:

“Saya juga tidak paham istilah-istilah akuntansi, tapi sebenarnya kami *ya pingin* punya pegawai bagian admin keuangan”. Mendengar tanggapan demikian, peneliti bertanya, “Kenapa Pak *kok* ingin punya pegawai admin keuangan?”

Pak RR menjawab: “Yo gak ngurusu bon, gak nyatet-nyatet, sembarang kari takok.”

[terj. Ind.: “ya tidak perlu mengurus nota, tidak perlu mencatat, cukup bertanya”]

Saat itu Pak HPU juga ikut mendengarkan Pak RR.

Jawaban Pak RR ini mengindikasikan bahwa sebenarnya mereka membutuhkan informasi keuangan, seperti: berapa saldo utang ke pemasok, dan berapa piutang yang belum dibayar dan kapan dapat ditagih, dapat mendukung keputusan bisnis.

Ketika peneliti bertanya tentang SAK EMKM, semua informan menjawab tidak pernah mengetahui SAK EMKM, sama seperti hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui SAK EMKM (Anisah & Pujiati, 2018; Parwati & Putra, 2022; Sholikin & Setiawan, 2018; Zulfikar et al., 2022). UMKM di wilayah pasar wisata biasanya mendapatkan perhatian dari pemda setempat untuk mendapatkan informasi, pelatihan dan layanan perijinan.

Berdasarkan observasi dari laman resminya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo cukup aktif memberikan dukungan pada perkembangan UMKM. Ada bazaar, pembinaan, fasilitas konsultasi dan pendampingan akses pembiayaan, bimbingan teknis (bimtek) keuangan sederhana, pelatihan menghitung harga pokok penjualan, bimtek *digital marketing* (Kabupaten Sidoarjo, 2022). Pada laman kumpulan berita, tampak ada kegiatan pelatihan pelaporan keuangan untuk UMKM, namun frekuensinya lebih sedikit daripada pelatihan tentang pemasaran. Tidak tampak ada pelatihan topik khusus tentang SAK EMKM. Ketika ditanya tentang keikutsertaan pelatihan, Pak HPU menjawab : *“oh yo kapan itu memang ada info pelatihan saka dinas, nang grup WA. Tapi kene nate melu sing pelatihan opo kuwi mbiyen? Dudu laporan keuangan... tapi opo yo... lali, digital marketing koyoke.”* [terj. Ind.: tempo hari memang ada info pelatihan dari dinas, ada di grup WA. Tetapi kami perlu ikut yang pelatihan apa ya? Bukan laporan keuangan, tetapi apa ya, lupa. Sepertinya (pelatihan) digital marketing]. Pak HPU dan rekannya mengungkapkan bahwa jika ada pelatihan, mereka agak malas datang, walaupun sebenarnya ingin ikut pelatihan.

Implementasi SAK EMKM masih bersifat voluntary bagi para pelaku UMKM. Sumber modal UMKM dapat dari berbagai sumber, tidak selalu mensyaratkan penerapan SAK EMKM. Direktur Jatim Ventura menyebutkan bahwa: *“UMKM yang ingin meminjam modal tidak harus menerapkan SAK EMKM, namun setidaknya dapat memperlihatkan laporan keuangan yang mereka rancang sendiri. Untuk kelayakan perolehan modalnya, biasanya Tim dari Jatim Ventura mencek kembali juga tentang arus kas penjualan yang terjadi pada UMKM ini.”*

Tanggapan informan pelaku usaha pada wawancara mengenai pengetahuan akuntansi menunjukkan bahwa ada sikap skeptis pada akuntansi. Para pelaku usaha memprioritaskan aktivitas produksi dan penjualan, karena berasumsi tidak ada hal yang memaksa perusahaan untuk membuat laporan keuangan. Namun,

mereka menyadari dibutuhkannya informasi keuangan. Sikap skeptis pengusaha mikro terhadap akuntansi ini sejalan dengan hasil penelitian (Biduri et al., 2021).

Penerapan Asumsi Dasar: Konsep Entitas, Kelangsungan Usaha dan Basis Akrua

Penerapan konsep entitas diidentifikasi dari peletakan modal awal, dan pemisahan pengelolaan keuangan perusahaan dengan keuangan pemilik. Pak HPU (pemilik), mengungkapkan:

“Saya dulu, modal cuma dua juta, habis itu saya pinjam lima juta, itu pun jaminan BPKB motor saya, dan itu saya minjam lewat bank. Abis itu saya gadaikan sertifikat rumah sebagai jaminan peminjaman bank mas, lek di total sampai lima ngatos juta mas, tapi yo alhamdulillah saya bisa melunasi utang tersebut pada tahun 2021.”

Terkait pemisahan pengelolaan keuangan perusahaan, tanggapan beliau sebagai berikut:

“uang yang saya dapatkan dari penjualan saya campur jadi satu (dengan uang pribadi), soale ngga onok sing bantu. Saya bujang, kalau udah nikah mungkin ada yang bantu soal keuangan.” kata beliau sambil tertawa.

Pernyataan dari informan menunjukkan bahwa belum ada penerapan konsep entitas di usaha ini. Alasan tidak diterapkannya konsep entitas ini cukup sederhana, yaitu kepraktisan. Ini menggambarkan perilaku pragmatis pelaku usaha. Utang pribadi masuk ke akun bank pribadi. Kemudian, uang dari penjualan juga masuk ke akun yang sama. Saldo akun bank tersebut digunakan untuk melunasi utang, mendanai operasional usaha, dan juga untuk keperluan pribadi. Dari tanggapan informan dapat diketahui bahwa sumber pendanaan eksternal tidak berbasis entitas usaha, melainkan atas nama pribadi pemilik.

Perilaku pragmatis pelaku usaha yang meniadakan konsep entitas, dapat berisiko bagi *sustainability* perusahaan. Tanpa pemisahan pengelolaan keuangan, maka kinerja perusahaan akan sulit diukur.

Sebagaimana dikutip dari wawancara dengan narasumber ahli, Bapak NA, direktur lembaga keuangan Jatim Ventura: *“Setiap UMKM perlu untuk membuat laporan keuangan agar dalam pencatatan kas masuk, kas keluar, kemudian piutang dan utang bisa terpantau, atau bisa dilihat apakah bisa memberikan penambahan aset lagi, atau bisa dikatakan usahanya makin maju atau usaha di ambang kebangkrutan”*.

Pemenuhan asumsi kelangsungan usaha teridentifikasi dari upaya pemilik dan rekannya untuk mempertahankan perusahaan. Pak HPU menyatakan bahwa sebelum pandemi, omzet penjualan pernah mencapai Rp 2 milyar per tahun. Di masa pandemi, usaha ini tetap dapat memproduksi walaupun jumlahnya menurun lebih dari 50%. Selain penjualan *offline*, Pak NS menangani penjualan *online*, untuk memperluas pasar. Hasil penjualan online ini dilaporkan secara manual ke Pak HPU. Di tahun 2021, penjualan berangsur meningkat. Para informan ini menginginkan dan berusaha agar bisnis ini terus berjalan.

Konsep akrual belum diterapkan sepenuhnya. Pemilik mencatat Penjualan dan Pembelian Bahan berdasarkan tanggal transaksinya, baik secara tunai maupun kredit. Pemilik memelihara catatan Piutang dan Utang. Namun, pencatatan ini hanya ada pada piutang yang berasal dari penjualan, serta nilai pokok utang bank serta utang pembelian bahan. Selain transaksi tersebut, dicatat berbasis kas. Informasi keuangan utama yang digunakan dalam pengambilan keputusan pemilik, adalah rekening bank.

Hasil observasi penelitian ini menunjukkan bahwa asumsi konsep entitas dan konsep akrual tidak dipenuhi. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Kartika et al., 2021). Pemilik merasa butuh waktu dan tenaga untuk menjalankan administrasi pencatatan, sehingga memilih buku bank sebagai sarana data keuangan. Pelaporan keuangan tidak diprioritaskan sebagai bagian dari kegiatan operasional utama di perusahaan. Alasannya adalah karena keterbatasan sumber daya pengetahuan tentang akuntansi, SDM, dan teknologi,

pengetahuan pentingnya pencatatan dan pemisahan pengelolaan keuangan perusahaan dengan pribadi untuk mengukur kinerja perusahaan, juga menjadi alasan tidak terpenuhinya asumsi entitas dan basis akrual. Hal ini sejalan dengan temuan (Auliah, 2019; Fiani & Opti, 2022; Sholikin & Setiawan, 2018).

Sistem Informasi Akuntansi

SIA menggambarkan prosedur mengumpulkan, mencatat dan melaporkan data untuk menyusun laporan keuangan. Prosedur ini diamati untuk menggali sumber daya dan melihat potensi penyajian laporan keuangan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dokumen yang ada hanyalah nota penjualan, kumpulan nota vendor, dan buku bank.

Pada siklus Pendapatan, Nota Penjualan adalah dokumen dasar informasi Kas Masuk dari Penjualan Tunai, dan Piutang. Setiap penjualan, dicatat di Nota Penjualan yang terdiri dari 2 lembar: putih, dan kuning (tembusan). Pak HPU membedakan Buku Nota untuk transaksi tunai dan transaksi kredit. Untuk transaksi kredit, Pak HPU menulis di Buku Nota transaksi kredit, dan si Pelanggan menerima lembar kuning. Lembar putih tidak dicabut dari buku nota. Nota tidak bernomor urut tercetak. Pak HPU (dan rekannya yang menjual) membubuhkan tanggal transaksi secara manual. Penulisan nota dilakukan secara urut dari lembar teratas di buku nota, sehingga nota penjualan menggambarkan penjualan secara kronologis. Total nilai di Nota Putih menunjukkan Nilai Piutang. Buku Nota Tunai digunakan untuk pencatatan penjualan Tunai. Buku Nota Tunai berisikan lembar kuning, karena lembar putih sudah diserahkan ke Pelanggan. Jadi, untuk mengetahui jumlah penjualan tunai selama periode tertentu, dilakukan dengan menjumlah transaksi-transaksi tunai di Buku Nota Tunai. Nota penjualan hanya digunakan untuk mencek Piutang dan Kas yang Diterima dari Penjualan. Data unit barang di nota hanya digunakan pada saat mencek pengambilan barang atau jika ada retur dari Pelanggan.

Pada Siklus Pengeluaran, Pak HPU dan rekannya mengumpulkan nota vendor untuk mengkalkulasi hutang dan jumlah pembelian bahan. Jumlah bahan dan barang jadi secara fisik dikontrol oleh Pak RR dan NS dibantu Kepala Bagian Produksi, yaitu Pak Mesran dan Pak Choirul. Keputusan pembelian bahan didasari oleh ketersediaan bahan secara fisik di gudang. Keputusan metode dan termin pembayaran ke vendor ditentukan oleh Pak HPU berdasarkan intuisi dan ketersediaan kas. Pak HPU dan rekannya melakukan kegiatan administrasi, penjualan dan pembelian, serta menjamin kas untuk operasional selalu tersedia.

Pengamatan pada dua siklus ini menunjukkan bahwa prosedur pencatatan transaksi sebagai dasar data pelaporan keuangan cukup terbatas. Temuan ini mendukung hasil penelitian dari Ezeagba (2017) dan Mohd Sallem et al (2017). yang menyatakan bahwa UMKM menghadapi tantangan berupa ketidaklayakan pencatatan, prosedur akuntansi yang tidak memadai, sumber daya manusia yang terbatas untuk mengerjakan prosedur akuntansi (Ezeagba, 2017; Mohd Sallem et al., 2017).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyajikan fakta alasan ketidaksiapan entitas mikro menerapkan SAK EMKM. Ada keinginan pelaku usaha untuk dapat berkembang, dan menyadari bahwa data keuangan yang baik dapat menunjang keputusan ekonominya. Namun, usaha mikro belum siap menerapkan SAK EMKM, karena tiga alasan: *Pertama*, keterbatasan pengetahuan mengenai pentingnya pelaporan keuangan berbasis akrual dan konsep entitas untuk pengukuran kinerja usaha, serta terbatasnya pengetahuan tentang *software* atau teknologi akuntansi yang mendukung prosedur akuntansi. *Kedua*, sikap skeptis pelaku usaha mikro terhadap akuntansi dan pragmatis dalam pengelolaan keuangan. Akuntansi dipandang sebagai prosedur administratif yang outputnya tidak berhubungan langsung ke peningkatan penjualan, dan

informasi berbasis kas sudah cukup untuk menggambarkan keberlangsungan usahanya. *Ketiga*, keterbatasan sumber daya manusia untuk mengerjakan kegiatan administratif, dan ketiadaan prosedur akuntansi.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

SAK EMKM yang dibuat untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan namun pada penerapannya belum dapat dilakukan UMKM secara mandiri. Pada kondisi dimana suatu UMKM belum memiliki prosedur akuntansi yang memadai, penerapan SAK EMKM dapat membawa perubahan dalam proses bisnis UMKM. Dalam perubahan akan muncul kendala-kendala, sehingga membutuhkan optimisme atau keyakinan untuk menghadapinya. UMKM membutuhkan sosialisasi, pendampingan khusus, bantuan secara komprehensif mencakup administrasi dokumen, sistem akuntansi, hingga penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan bahwa pencatatan keuangan di UMKM dibenahi secara bertahap, tidak harus langsung menyajikan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Langkah awal adalah menanamkan pentingnya penerapan konsep entitas agar UMKM dapat melakukan evaluasi diri, merancang strategi untuk bertahan dan berkembang. Langkah kedua, menata administrasi dokumen, seperti bukti transaksi dan pencatatan. Langkah ketiga, menetapkan prosedur SIA yang mencakup menentukan periode pencatatan sampai dengan pelaporannya, dan menyusun bagan akun. Pada tahap ini, UMKM diharapkan sudah memiliki sumber daya manusia yang memahami prosedur dan pengendalian internal, SAK EMKM, atau mendapat pembimbingan dari tenaga ahli: akuntan. Langkah selanjutnya, mulai menyusun neraca awal, dan laporan laba rugi akrual. Temuan pada penelitian ini mengimplikasikan bahwa implementasi SAK EMKM membutuhkan proses, dukungan, dan kerjasama pemerintah,

perguruan tinggi, organisasi profesi, dan UMKM itu sendiri, baik secara individu maupun kelompok/paguyuban UMKM. Perguruan tinggi, organisasi profesi, dan pemerintah daerah perlu bekerjasama untuk memberikan pengetahuan, maupun kemudahan berupa pendampingan atau keteraksesan pengetahuan kepada para pelaku UMKM tentang pentingnya akuntansi dan SAK EMKM. Pelaku UMKM juga perlu pro-aktif untuk membenahi pengelolaan dan pencatatannya, serta meningkatkan literasi pengelolaan keuangannya, Untuk penelitian selanjutnya, dapat dikembangkan telaah pada jenis industri dan ukuran perusahaan yang berbeda, misalnya pada usaha kelas menengah.

REFERENCES

- Adil, M., Nagu, N., Rustam, A., Wahyuni, Idrawahyuni, & Winarsih, E. (2022). Interpretive Paradigm on Development of Science and Accounting Research. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 1(4), 297–302. <https://doi.org/https://doi.org/10.55227/ijhess.v1i4.87>
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior* (2nd ed.). Open University Press.
- Anisah, N., & Pujiati, L. (2018). Kesiapan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah untuk Menunjang Kinerja. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 1(1), 45–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.26533/jad.v1i1.386>
- Auliah, M. R. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Pelaporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK ETAP. *Kaukab, M.Elfan*, 1(1), 131–139. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jebel/article/view/882/461>
- Biduri, S., Wardani, D. P. K., Hermawan, S., & Hariyanto, W. (2021). Skeptisme Pelaku Usaha Mikro terhadap Standar Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 431–448. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/1443/pdf>
- Clark, M. W. (1993). Entity Theory, Modern Capital Structure Theory, and The Distinction Between Debt and Equity. *Accounting Horizons*, 7(3), 14–31.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). Paradigma Interpretif pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, 6(3), 341–511. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/80474228/pdf-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1670224736&Signature=cfB5TA8IL1UVDX2IWjBDMXAH eDQiHqBJiVBKwHLwXlil4nb6d7eWmhbYTv6lqjepJmQfUKPuZ7V~zzJL K~rZYmYK5sjDx3JBP9OjAfOlnaDM Cj5HoSE5--ROn3J5bS2YXfnbqNKZGwe477~bRpRvRyAX>
- Dewi, L. G. K., & Sari, L. G. J. M. (2019). Analisis Kesiapan dan Pengetahuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan EMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 141–160. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/download/21900/1407/1/0>
- Ezeagba, C. (2017). Financial Reporting in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Nigeria: Challenges and Options. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 7(1), 1–10. https://www.researchgate.net/profile/Charles-Ezeagba/publication/320734350_Financial_Reporting_in_Small_and_Medium_Enterprises_SMEs_in_Nigeria_Challenges_and_Options/links/59f8

- 7104aca272607e2f4d33/Financial-Reporting-in-Small-and-Medium-Enterprises-SMEs-i
- Fiani, L. F., & Opti, S. (2022). Analisis Tingkat Pemahaman dan Kesiapan Pelaku UMKM terhadap Implementasi Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM. *Trilogi Accounting and Business Research*, 03(01), 114–134. <https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/TABR/article/view/1283/pdf>
- IAI, D. S. A. K. (DSAK). (2016). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro, Kecil dan Menengah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (2021).
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, (2008).
- Kabupaten Sidoarjo, D. (2022). *Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo*. <https://diskopda.sidoarjokab.go.id/?page=informasi&p=21>
- Kartika, S. E., Puspaningrum, D. A., & Widowati. (2021). Tingkat Pemahaman dan Kesiapan Pelaku UMKM di Kota Mataram dalam Implementasi SAK EMKM. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 670–685. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32538>
- Luchindawati, D. S., Nuraina, E., & Astuti, E. (2021). Analisis Kesiapan UMKM Batik di Kota Madiun dalam Penerapan SAK EMKM. *Krisna, Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 241–249. [file:///C:/Users/HP/Downloads/2486-Article Text-12911-1-10-20210104-1.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/2486-Article%20Text-12911-1-10-20210104-1.pdf)
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. *The American Economic Review*, 3(June), 261–297.
- Mohd Sallem, N. R., Mohd Nasir, N. E., Mohd Nori, W. M. N., & CheKu Kassim, C. K. H. (2017). Small and Medium Enterprises: Critical Problems and Possible Solutions. *International Business Management*, 11(1), 47–52. https://www.researchgate.net/profile/Noor-Mohd-Nasir-3/publication/320163628_Small_and_Medium_Enterprises_Critical_Problems_and_Possible_Solutions/links/59d1ae7ba6fdcc181ad3b4e1/Small-and-Medium-Enterprises-Critical-Problems-and-Possible-Solutions.pdf
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (4th ed.). Salemba Empat.
- Parwati, K. D. A., & Putra, I. M. E. L. (2022). Analisis Kesiapan Pelaku UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah pada UMKM Kabupaten Gianyar. *HITA Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 46–58. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/3057/1784>
- Paton, W. A. (1922). *Accounting Theory*. The Rolland Press.
- Purba, M. P. (2009). *Asumsi Going Concern: Suatu Tinjauan terhadap Dampak Krisis Keunagan atas Opini Audit dan Laporan Keuangan*. Graha Ilmu.
- Rejeki, D. (2020). Kesiapan Para Pelaku UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(3). <https://ojs.ekonomi-ungris.ac.id/index.php/JABK/article/view/446/pdf>

- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems* (14th ed.). Pearson. 5/jifa.v1i2.1441
- Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2018). Pemahaman Pelaku UMKM terhadap SAK EMKM: Survey pada UMKM yang Terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. *Akuntansi Dewantara*, 2(2), 194–204. <https://core.ac.uk/download/pdf/230381874.pdf>
- Shonhadji, N. (2021). Penggunaan Teori Sosial dalam Paradigma Interpretif pada Penelitian Akuntansi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 5(1), 49–68. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka/article/view/3972>
- Sholikin, A., & Setiawan, A. (2018). Kesiapan UMKM terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi UMKM di Kabupaten Blora). *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(2), 35–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.2251>
- Soeherman, B. (2019). *Fun Research: Penelitian Kualitatif dengan Design Thinking*. PT Elex Media Komputindo.
- Zulfikar, R., Astuti, K. D., & Ismail, T. (2022). Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) in Indonesia: Factors and Implication. *Quality - Access to Success*, 23(189), 128–143.